KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004366.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN IKA TAN PESANTREN INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NIA KURNIASIH, SH , sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh NIA KURNIASIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan IKA TAN PESANTREN INDONESIA disingkat IPI tanggal 09 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016060931102057 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan IKA TAN PESANTREN INDONESIA disingkat IPI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN IKA TAN PESANTREN INDONESIA disingkat IPI
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, sesuai salinan Akta Nomo 06 Tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris NIA KURNIASIH, SH yan berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juni 2016

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0064368.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN IKA TAN PESANTREN INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ZAINI AHMAD SURO RADEN KI BAGUS	3514071908690004	PENGURUS	KETUA UMUM
H. AHMAD IMRON	3603052210780003	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
MOHAMAD AULIA BUNJAMIN SALEH NOOR	3171061709690010	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
PROF DR. H. NUR SYAM	357822070858004	PENGAWAS	KETUA UMUM

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juni 2016

Dipindai dengan CamScanner